

Pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh

Iqlima Azhar

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, Langsa Aceh

Email: iqlima_a@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi terhadap manajemen aset. Penelitian ini dilakukan pada pegawai bagian barang di Dinas dan Badan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu dengan membagikan daftar pernyataan (kuesioner) kepada setiap responden. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan jumlah sampel sebanyak 54 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara sistem informasi terhadap manajemen asset erat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.967 atau sebesar 96.7%. Selanjutnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.935 yang berarti bahwa sebesar 93.5% manajemen aset dipengaruhi oleh sistem informasi sedangkan sisanya sebesar 6.5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata kunci: *Manajemen aset, Sistem Informasi, Pemerintah Kota Banda Aceh, Aceh.*

PENDAHULUAN

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PP No.6/2006, pasal 1). Aset daerah bisa disebut sebagai sebuah kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang tercakup dalam aktiva. Pemerintah daerah membutuhkan adanya manajemen aset adanya manajemen aset yang baik agar dapat memantau, menghitung, dan memahami kondisi aset/barang yang dimiliki, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Manajemen aset tidak hanya untuk melihat aset mana saja yang dibeli dan berapa biayanya, aset mana yang digunakan dan bagaimana mereka dimanfaatkan, di mana ditempatkan, termasuk dalam biaya apa, tetapi juga membantu mencegah hilangnya aset tersebut.

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian penting dari keuangan Negara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Pengaturan tentang barang milik daerah selanjutnya ditetapkan dalam PP No.6/2006 tentang pengelolaan barang milik daerah dengan pedoman teknis berupa Peraturan Mendagri No.17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

PP No.56/2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah juga menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di daerahnya masing-masing. Teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola aset daerah cukup dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan

nilai kerugian yang sangat besar akibat kelalaian dalam pengelolaan aset daerah. Mardiasmo (2002:237) menyatakan bahwa terkait dengan peningkatan kewenangan manajemen aset negara maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, sampai pertanggungjawaban dan pengawasan. Dengan demikian, terlihat adanya kebutuhan akan suatu sistem informasi manajemen aset yang mampu mengoptimalkan pengelolaan aset daerah/barang milik daerah.

Dalam mengelola barang milik daerah, kepala SKPD adalah pejabat pengguna barang daerah (PP No.58/2005 Pasal 5 angka 3 huruf b), dan dibawah SKPD ada Pengurus Barang dan Penyimpan Barang (sesuai dengan PP No.6/2006). Qanun Kota Banda Aceh No.1/2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 angka 1 menyatakan bahwa: "Pejabat pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna barang".

Sistem informasi sebagai salah satu upaya yang diperlukan untuk mengelola aset daerah dianggap penting, sesuai dengan PP No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Anggota DPRK Banda Aceh dari Komisi A, Surya Mutiara menilai Wali Kota Banda Aceh tak serius dalam mengelola aset daerah. Hal ini dapat dilihat dari penilaian dan penataan sejumlah aset milik Pemko Banda Aceh yang tidak tertata dengan baik (serambinews.com, 18 Mei 2012), sehingga hampir setiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dia mempersoalkan aset berupa tanah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang hingga kini belum bersertifikat sehingga status aset tersebut tidak jelas, padahal biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut selalu dianggarkan dalam APBK. Surya memaparkan, "hingga

Agustus 2010 masih terdapat 62.907 meter persegi tanah Pemko Banda Aceh yang belum bersertifikat, dan penyebab berlarut-larutnya proses penerbitan sertifikat atas tanah aset pemko tersebut di antaranya, karena tak diketahui letak tanahnya dan belum diukur". DPRK Banda Aceh sejak tahun 2007 telah berulang kali meminta Wali Kota menuntaskan pengurusan sertifikat tanah yang telah dibebaskan sejak tahun 2005, agar aset tersebut tidak hilang. Disamping itu, PP No.6/2006, dan Permendagri No.17/2007 menyebutkan bahwa barang milik daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berminat ingin melakukan penelitian mengenai manajemen aset, dan faktor yang diduga mempengaruhinya, yaitu sistem informasi.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

1. Manajemen Aset

Manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengertian manajemen itu sendiri adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2000:1).

Manajemen menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah "penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran" atau pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Griffin (2004:8) menyatakan manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien. Sabardi (2001:4) menyebutkan beberapa

pengertian manajemen menurut para ahli. Yaitu menurut Luther Gulick, seorang pendidik dan pengarang buku manajemen, mendefinisikan manajemen sebagai bidang pengetahuan, yang mencari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menjadikan kerjasama itu berguna untuk kemanusiaan. Menurut Nelson dan Lie, Manajemen dinyatakan sebagai ilmu dan seni, dikatakan sebagai ilmu karena manajemen merupakan kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Dan dikatakan sebagai seni karena keberhasilan pimpinan dalam usahanya mencapai tujuan dengan bantuan bawahan, yang dapat menarik perhatian dan mempengaruhi orang lain sehingga mereka dengan senang hati mau mengikuti perintah pimpinan. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara singkat, menurut Williams (2001:6), manajemen adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Definisi manajemen menurut Ensiklopedi Administrasi Indonesia, dalam LAN (2007:3) adalah segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara jika dilihat dari kata management yang berasal dari bahasa Inggris (LAN, 2007:2), manajemen artinya adalah pengelolaan, dan ini berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola. Untuk lebih mudahnya, pengertian manajemen menurut Panglaykin dari *Encyclopedia of Social Sciences*, dalam LAN (2007:3) dapat diartikan sebagai proses dengan mana pelaksanaan dari tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi.

Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Aset berwujud atau disebut aset tetap berdasarkan KEPMENKEU No.1/2001 adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBN melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBN melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan. Berdasarkan Undang-undang No.1/2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Manajemen aset sangat penting karena akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Alasan pentingnya manajemen aset meliputi kebutuhan untuk menegaskan posisi hukum setiap aset terutama tanah dan bangunan yang seringkali menjadi objek sengketa antar lebih dari satu instansi, kebutuhan perawatan aset, penegasan pihak yang bertanggung jawab mengelola aset ini. Barang milik/kekayaan daerah (BMD) adalah semua barang milik Daerah yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) ataupun dengan dana diluar APBK yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (Perwal Banda Aceh No.63/2010). Berdasarkan Perwal Banda Aceh No.63/2010 tentang Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah dalam kebijakan akuntansi pemerintah Kota Banda Aceh, Aset Tetap adalah aset berwujud yang

dimiliki dan atau dikuasai pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBK melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

Dalam ilmu properti sekarang ini berkembang suatu teori baru yang dikenal dengan manajemen aset atau *asset management*. Manajemen aset memiliki ruang lingkup utama untuk mengontrol biaya pemanfaatan ataupun penggunaan aset dalam kaitan mendukung operasional pemerintah daerah (Akbar dan Lukman, 2010:3). Selain itu ada upaya pula untuk melakukan inventarisasi aset-aset pemda yang tidak digunakan. *World Bank* (2000) dalam Akbar dan Lukman (2010:3) menyatakan bahwa manajemen aset merupakan suatu proses untuk perbaikan pemahaman kondisi aset, perbaikan biaya operasi, dan kinerja, yang membantu perbaikan dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan.

Manajemen aset kedepannya diharapkan dapat diarahkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. Menurut Wessel dan Tenny (2005:33), *asset management is a form of applied system thinking*, yaitu suatu cara

berpikir tentang sistem yang kompleks dan seperangkat alat dan untuk menempatkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam praktek. Dengan alat-alat perangkat lunak yang sesuai, staf dapat menganalisis seluruh aset dengan lebih baik untuk menentukan cara terbaik untuk menjaga suatu sistem berfungsi dengan lancar. Menurut Jim (2007) dalam Hanis (2009:36), manajemen aset didefinisikan sebagai *a continuous process-improvement strategy for improving the availability, safety, reliability and longevity of assets; that is systems, facilities, equipment and processes*, yaitu suatu strategi proses-perbaikan yang terus menerus untuk meningkatkan ketersediaan, keamanan, keandalan dan umur panjang dari aset tersebut, yaitu: sistem, fasilitas, peralatan dan prosesnya.

Manajemen aset atau pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No.17/2007 Pasal 4 angka 2, mencakup rangkaian kegiatan dari: perencanaan penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Berdasarkan tahapan kerjanya, manajemen aset dapat dibagi atas 5 (lima), (manajemenaset08.blogspot.com), yaitu:

1. Inventarisasi aset, terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain.
2. Legal audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai

pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dan lain-lain.

3. Penilaian aset, suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk ini pemda dapat melakukan outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan independen, namun pemda juga harus mempunyai anggota penilai sendiri yang handal agar nilai yang dihasilkan nantinya dapat dipahami dan akurat. Hasil nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
4. Optimalisasi aset bertujuan mengoptimalkan potensi fisik, lokasi nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam hal ini, aset-aset yang dikuasai pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi berdasarkan sektor-sektor unggulan dan mencari penyebab sektor yang tidak berpotensi. Sehingga hasilnya dapat dibuat sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset.
5. Pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemda saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui sistem informasi manajemen aset. Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas, karena keempat aspek di atas diakomodir dalam suatu sistem yang termonitor dengan jelas seperti sistem arus keuangan yang terjadi di perbankan. sehingga penanganan dan pertanggungjawaban dari tingkat

pelaksana hingga pimpinan mempunyai otorisasi yang jelas. Hal ini diharapkan akan meminimalisasi adanya praktik KKN.

Harus dipahami oleh pemerintah daerah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan aset daerah. Kenyataan sampai saat ini aset daerah masih dikelola seadanya, sebatas inventarisasi belaka (pencatatan akuntansi). Aset daerah masih dikonsultasikan dengan arus kas negatif, dibanding sebagai aset yang produktif dan memberikan pendapatan. Kondisi pemanfaatan terhadap aset daerah tersebut membuktikan bahwa aset daerah sebagai sumber daya lokal daerah menunjukkan utilitasnya yang masih rendah, hal ini terjadi karena di hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia belum ada pemahaman pengelolaan aset daerah secara utuh dalam kerangka manajemen aset.

Makna manajemen aset daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah (agusranu.blogspot.com).

2. Sistem Informasi

Dalam pengelolaan aset daerah dibutuhkan keberadaan sistem informasi. Menurut Hall (2001) dalam Kadir (2003:11), sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan (Kadir, 2003:4). Di antara bermacam-macam

jenis sistem informasi, salah satunya adalah e-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen (Kadir, 2003:70), seperti:

1. Perangkat keras (*hardware*), mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer.
2. Perangkat lunak (*software*) atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
3. Prosedur, yaitu Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
4. Orang, yakni Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.
5. Basis data (*database*), yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data.
6. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Pada dasarnya, banyak aktivitas manusia sekarang ini yang berhubungan dengan sistem informasi, disadari atau tidak, sistem informasi telah banyak membantu manusia dan menjadi suatu kebutuhan (Kadir, 2003:71).

Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah (Pasal 1 angka 16 PP No.56/2005). Sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan

kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Pasal 1 angka 15 PP No.56/2005).

3. Hubungan Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset.

Mardiasmo (2002:237) mengemukakan bahwa terkait dengan peningkatan kewenangan manajemen aset negara maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, serta pengawasan. Berdasarkan kutipan tersebut, terlihat adanya kebutuhan akan suatu sistem informasi manajemen aset yang mampu mengoptimalkan aset daerah. Berdasarkan PP No.56/2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah juga menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di daerahnya masing-masing. Penelitian Grubisic (2009) menemukan bahwa kurangnya informasi tentang aset publik mempersulit penentuan nilai aset, penganggaran untuk kegiatan pengelolaan aset, dan mengevaluasi kinerja portofolio aset publik. Dengan demikian, sistem informasi berperan penting dalam pengelolaan aset publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu dengan cara membagikan langsung daftar pertanyaan (kuesioner) kepada setiap responden. Responden diarahkan dan didampingi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pemahaman atas pertanyaan yang telah disiapkan. Jawaban kuesioner akan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Cara ini ditempuh dengan pertimbangan untuk menghindari hilang atau tidak kembalinya kuesioner.

Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari responden bersifat kualitatif dikuantitatifkan (Sekaran, 2003)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja sebagai pengguna, pengurus, dan/atau penyimpan barang pada SKPD di Pemerintahan Kota Banda Aceh karena berhubungan langsung dalam mengelola aset/barang milik daerah. Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh peneliti, jumlah SKPD yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh sebanyak 18. Setiap SKPD memiliki 3 sampai 4 orang yang menjabat sebagai pengguna, pengurus, dan/atau penyimpan barang (dapat dilihat pada lampiran 5, SK pejabat pengelola barang). Penelitian ini akan mempertimbangkan seluruh populasi yaitu 54 orang yang berhubungan langsung dalam mengelola aset/barang milik daerah., sehingga jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian sensus.

Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis parsial satu variabel dependen dengan variabel independen dan melihat pengaruh sistem informasi terhadap manajemen aset pada pemerintah Kota Banda Aceh yang diolah dengan menggunakan program komputer SPSS (*Statistical Package for*

Social Science). Spesifikasi persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

dimana:

- Y : Manajemen Aset
- a : Konstanta
- X₁ : Sistem Informasi
- e : error term
- b : Koefisien Regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap variabel sistem informasi (X₃) diperoleh nilai koefisien β₂ = 0,122, dengan nilai signifikansi (P_{value}) sebesar 0,007. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset, jadi hipotesis Ha diterima dan menolak H₀. Ha diterima karena P_{value} ≤ 0,05 yaitu 0,007. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengolahan data dengan menggunakan statistik linier berganda seperti terlihat pada out SPSS dibawah ini:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.526	1.025		14.914	.000
Sistem Informasi	.122	.048	.099	2.640	.009

a. Dependent Variable: Manajemen aset

Dari output tersebut, keterkaitan antara sistem informasi sebagai fungsi dari manajemen aset dapat di tulis dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 15.526 + 0.122X_3 + e$$

Dari persamaan linier berganda tersebut dapat interpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 15,526 menyatakan bahwa jika variabel sistem informasi bernilai konstan,

maka besarnya nilai manajemen aset adalah sebesar 15,526.

Hasil tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 104 UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu perlu menetapkan peraturan pemerintah daerah tentang sistem informasi keuangan daerah (dalam menimbang PP No.56/2005). Pasal 11 PP No.56/2005 juga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah di daerahnya masing-masing.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisa data yang telah dilakukan dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Informasi secara berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset pada SKPD di Pemko Banda Aceh.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pegawai bagian pengguna barang, pengurus, dan penyimpan barang di setiap SKPD pada Pemerintahan Kota Banda Aceh, sehingga tidak menggali lebih jauh pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Tidak semua responden mengisi kuisisioner di depan peneliti, atas permintaan responden untuk meninggalkan kuisisioner karena kesibukan mereka sehingga kemungkinan adanya ketidakseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan dan peneliti tidak bisa melakukan wawancara lebih dalam dengan responden terkait variabel-variabel yang diteliti.

Saran

Saran untuk pemerintah Kota anda aceh adalah supaya dalam melaksanakan tugas

diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi pada diri masing-masing pejabat untuk mengelola aset milik daerah dengan sebaik-baiknya, karena aset daerah ini berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat, dan jika dimaksimalkan penggunaannya maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pejabat diharapkan dapat belajar lagi tentang regulasi yang mengatur mengenai manajemen aset, dan lebih sering lagi mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi anda. Dengan adanya regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah diharapkan para aparatur daerah dapat menjalankan tugas yang diemban sesuai dengan peraturan tersebut, serta melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk pejabat pengelola barang. Untuk sarana dan prasarana sebagai media sistem informasi untuk menjalankan manajemen aset yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif diharapkan dapat tetap dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketetapan Pemerintah Daerah.

Berikutnya, saran untuk peneliti selanjutnya, direkomendasikan penelitian dapat dilakukan pada lingkungan yang berbeda, yaitu lebih luas lagi seperti pada Pemerintahan Kabupaten/Kota atau di Pemerintahan Provinsi Aceh, dan dengan menambah variabel lain, R^2 pada penelitian ini hanya 93,5%, yaitu berarti masih ada 6.5% variabel lain di luar dari variabel yang ada dalam penelitian ini yang dapat diteliti pengaruhnya terhadap manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah. Untuk pengisian kuisisioner mungkin juga bisa di koordinasikan dengan pejabat yang berwenang untuk dilakukan diluar jam kerja, sehingga jawaban yang diberikan mungkin akan berbeda dengan yang diisi pada saat jam kerja.

Referensi

- (Tanpa nama). 2010. **Pemko Dinilai Tak Serius kelola Aset Daerah**. Melalui <<http://www.serambinews.com/news/view/37754/pemko-dinilai-tak-serius-kelola-aset-daerah>>[18/5/12]
- Abdullah, Syukriy. 2009. **Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah**. Melalui <<http://syukriy.wordpress.com/2009/04/25/optimalisasi-pengelolaan-aset-daerah/>>[18/5/12]
- Agusranu. 2011. **Manajemen Aset Barang Milik Daerah**. Melalui <http://agusranu.blogspot.com/2011/07/manajemen-aset-barang-milik-daerah-1.html>>[15/5/12]
- Agustina, Maria. 2005. **Manajemen Aset (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah Studi Kasus di Kabupaten Pontianak**, Tesis S-2 Program.
- Akbar, Roos & Lukman Azhari. 2010. **Manajemen Taman Milik pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan manajemen Aset**. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Bertovic, Hrugo, Olga Kaganova & John Rutledge. 2002. *Asset Management Model for Local Governments*, Local Government Reform Project (LGRP), The Urban Institute.
- Chair, Abdul. 2001. **Peranan Manajemen dalam Upaya Meningkatkan Kegunaan Aset Tanah dan Bangunan untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Pemda DKI Jakarta)**. Tesis S-2. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Griffin, Ricky. 2004. **Manajemen**. Edisi 7 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Grubisic, Mihaela, Mustafa Nusinovic & Gorana Roje. 2009. *Towards Efficient Public Sector Asset Management*. Disertasi-Abstrak. Zagreb: The Institute of Economics.
- Hanis, H.M, Bambang Trigunaryah & Connie Susilawati. 2009. **The Application of Public Asset Management in Indonesian Government**. *Journal of Corporate Real Estate*. Vol. 13 No.1.
- Hasibuan, Malayu. 2000. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Bumi Aksara.
<http://bandaaceh.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2012/03/plugin-kotabandaaceh-2007-1.pdf>>[18/5/12]
- http://jdih.bsn.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:regulasi&catid=36:info-hukum&Itemid=59>[21/5/12]
- <http://www.artikata.com/arti-358461-peraturan.html>>[21/5/12]
- <http://www.serambinews.com/news/view/37754/pemko-dinilai-tak-serius-kelola-aset-daerah>. Diakses tanggal 18 Mei 2012.
- Ishak, M. 2002. **Akuntansi dan Aspek-Aspek perilaku**. Paper yang disampaikan pada saat melakukan pembimbingan teknis atas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Magelang.
- Kadir, Abdul. 2003. **Pengenalan Sistem Informasi**. Yogyakarta: ANDI
- Kurniawan, Wawan. 2008. **Peraturan Perundang-undangan**. Jakarta: Azka Press.

- LAN. 2007. *Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah*, Modul I: **Dasar-dasar Manajemen Aset/Barang Milik Daerah**.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mitchell, John S. 2006. *Physical Asset Management Handbook*. CLARION Technical, Boston.
- Pakiding, Yanuaris. 2006. *Hubungan Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bantul)*, Tesis S2 Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Pandu. 2009. **Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah**. Melalui <http://manajemenaset08.blogspot.com/2009/01/sistem-informasi-manajemen-aset-daerah.html>>[18/5/12]
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 53 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Walikota Banda Aceh No.63 Tahun 2010, *Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh*.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan No.1 Tahun 2001, *Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.17 tahun 2003, *Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.1 tahun 2004, *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.10 tahun 2004, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.12 tahun 2004, *Tentang Pembentukan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.32 tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.33 tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.24, Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI No.11 tahun 2006, *Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Republik Indonesia, Qanun Kota Banda Aceh No.1 Tahun 2007, *Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Robbins. 2008. **Perilaku Organisasi**. Edisi Bahasa Indonesia, Cetakan III, Terjemahan Molan, Benyamin. Jakarta: PT.Indeks.
- Sabardi, Agus. 2001. **Manajemen Pengantar**. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Singgih. 2005. *Mengatasi Berbagai Masalah dengan SPSS Versi 11.5*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sanapiah, Aziz. 2005. *Strategi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan*. Tesis Dipublikasikan. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. edisi 4 buku 1. Terjemahan Yon, Kwan, Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. edisi 4 buku 2. Terjemahan Yon, Kwan, Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Doli D. 2004. *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, Doli D. 2004. **Manajemen Aset**, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Surminah, Iin. 2008. **Manajemen Aset di Lembaga Litbang**. PAPPIPTEK: LIPI.
- Sutabri, Tata. 2005. **Sistem Informasi Manajemen**. Edisi I. Yogyakarta: ANDI.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. **Manajemen Publik**. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wessels, Eric & Tenny Ed. 2005. *Practical Asset Management. Water Environment & Technology*, ProQuest. Vol: 7, Hal: 32.
- Widayanti, Endang. 2010. *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen)*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Williams, Chuck. 2001. **Manajemen**. Edisi Pertama, Terjemahan Napitupulu, Sabaruddin. Jakarta: Salemba Empat.
- Winardi. 2004. **Manajemen Perilaku Organisasi**. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.